

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Dewan Keamanan PBB sebagai organisasi internasional bertanggung jawab penuh dalam mengawal kedaulatan negara Republik Afrika Tengah dari pemberontakan kelompok-kelompok etnis. Seleka berusaha untuk mengambil alih pemerintahan Francois Bozize dan menguasai sumber daya alam (emas dan berlian). Michael Djotodia selaku ketua Seleka ketika menjabat sebagai Presiden tidak mampu mengendalikan negara. Dominasi Seleka memicu tumbuhnya kelompok pemberontak lain yang merasa dirugikan oleh keberadaan Seleka. Anti-Balaka merupakan sekumpulan pemberontak yang beranggotakan mantan militer Francois Bozize dan penduduk non-muslim yang resah dengan “penjajahan” Seleka. Mayoritas anggota Seleka merupakan orang islam yang berasal dari barat Republik Afrika Tengah. Kedua kelompok ini berusaha memperebutkan kekuasaan.

Resolusi konflik DK PBB melalui resolusi 2127 membawa dampak peningkatan keamanan yang mengakibatkan penurunan korban dari tahun 2012-2016 dan pengembalian kekuasaan dengan tata cara yang benar sesuai konstitusi yang berlaku. Peningkatan keamanan ditandai dengan penggabungan BINUCA dan MISCA menjadi MINUSCA. *Peacekeeping Operation* (MINUSCA) digunakan sebagai aktor untuk menstabilkan keamanan dari segala pemberontakan. DK PBB meminta dukungan masyarakat internasional seperti ECCAS dan Uni Afrika untuk berkoordinasi melindungi warga sipil Republik Afrika Tengah. Mengingat dinamika konflik yang terjadi mengalami perubahan dari konflik antara pemerintah dan pemberontak menjadi konflik antar kelompok etnis. Mulai dari kegagalan Francois Bozize membagi kekuasaan kepada beberapa kelompok kepentingan, pembentukan koalisi penentang Bozize yaitu Seleka, sampai pemberontakan Anti-Balaka pasca lengsernya Michael Djotodia.

Keamanan yang dihasilkan oleh *Peacekeeping Operation* berupa pengurangan jumlah korban disetiap peristiwa terjadinya bentrokan antara kelompok pemberontak. Berdasarkan data statistik peristiwa bentrokan dan angka kematian yang diteliti oleh Matt-Batten-Carew, angka kematian korban konflik dari tahun 2013-2016 menurun, dari 1100 orang meninggal menjadi sekitar 30 orang yang menjadi korban kekerasan pada setiap peristiwa yang tercatat dalam *the Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED)*.

Sejumlah 1.200 Komunitas muslim diselamatkan dan bantuan lain seperti tikar, selimut, peralatan dapur, terpal dan tenda darurat di berikan kepada 120.000 warga sipil yang terlantar di delapan provinsi berbeda oleh UNHCR yang bekerjasama dengan MINUSCA.

Konsistensi Dewan Keamanan dalam upaya lanjutan berupa *peacebuilding* terlihat pada keberhasilan pengawalan MINUSCA pada pemilihan umum Republik Afrika Tengah pada tahun 2015-2016. *Special Report* dari *United State Institute of Peace* mengatakan bahwa pemilu Republik Afrika Tengah tahun 2015-2016 berjalan tanpa kekerasan besar. Dikarenakan komitmen warga negara untuk memilih secara damai, upaya aktor internasional dan masyarakat sipil untuk mengendalikan diri serta menghormati waktu transisional dalam masa-masa pemilu.

Dewan Keamanan PBB sebagai organisasi internasional berhasil mengupayakan *peacekeeping* dan *peacebuilding* sebagai resolusi konflik terhadap konflik internal di Republik Afrika Tengah dalam rentang waktu 2012-2016 melalui resolusi 2127. Dalam isu konflik RAT Dewan Keamanan PBB berhasil berperan sebagai instrumen, arena dan aktor. Sebagai instrumen, DK PBB dapat menjadi sarana menentukan penyelesaian isu-isu keamanan bagi negara-negara anggotanya melalui proses politik di dalam forum. Sebagai arena, DK PBB menjadi wadah berinteraksi antar negara anggota untuk menciptakan suatu rumusan kebijakan bersama (resolusi). Sebagai aktor, Dewan Keamanan berhasil menjadi aktor

berbadan hukum yang mengikat negara-negara anggota telah bersepakat dan bersedia menyerahkan sebagian kedaulatannya pada organisasi internasional untuk menegakan keamanan dan memulihkan kedaulatan Republik Afrika Tengah.